

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM CHECK AND BALANCES
TERHADAP LEMBAGA EKSEKUTIF**

**Divya Triana Rahmawati¹, Niken Fernanda², Rayna Putri Juliasari³,
Efi Lailatun Nisfah⁴, Yohana Sandi Wijayanti⁵, Kuswan Hadji⁶**
divyatriana222@gmail.com¹, fernandaniken0@gmail.com², rayna8025@gmail.com³,
efilaila568@gmail.com⁴, sandiyohana05@gmail.com⁵, kuswanhadji@untidar.ac.id⁶
Universitas Tidar

Abstrak: Sistem check and balances adalah sebuah prinsip yang menegaskan pentingnya pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam sistem pemerintahan. Dalam penerapannya pada lembaga eksekutif, sistem check and balances ini masih banyak ditemukan penyimpangan, oleh karena itu diperlukan solusi yang efektif untuk mengatasi hal itu. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem check and balances di lembaga eksekutif serta mengevaluasi pengawasan yang dilakukan untuk memberikan solusi yang efektif untuk mengatasi konflik tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yang berarti data yang dibutuhkan diambil dari berbagai sumber literasi dan media terkait. Sistem check and balances sangat penting diterapkan untuk mencapai keseimbangan dalam pemerintahan serta mencegah terjadinya abuse of powers. Namun, implementasi sistem check and balances terhadap lembaga eksekutif masih belum optimal. Masih banyak penyimpangan yang terjadi karena banyak faktor seperti kurangnya independensi lembaga negara, dominasi lembaga eksekutif yang terlalu besar dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini kami memberikan beberapa solusi yang mungkin bisa meningkatkan kinerja pemerintahan menjadi lebih akuntabel, demokratis, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Kata Kunci: Check And Balances, Lembaga Eksekutif, Implementasi.

Abstract: *The system of checks and balances is a principle that emphasizes the importance of the division of power between the executive, legislative and judicial branches of government. In its application in the executive branch, this system of checks and balances still has many irregularities, therefore an effective solution is needed to overcome it. This research was conducted with the aim of analyzing deviations that occur in the implementation of the checks and balances system in the executive branch and evaluating the supervision carried out to provide effective solutions to overcome these conflicts. This research is conducted using a qualitative method, which means that the data needed is taken from various sources of literacy and related media. The system of checks and balances is very important to be implemented to achieve balance in government and prevent abuse of powers. However, the implementation of the checks and balances system for the executive is still not optimal. There are still many irregularities that occur due to many factors such as the lack of independence of state institutions, the dominance of executive agencies that are too large and so on. In this study we provide several solutions that might improve government performance to be more accountable, democratic, and free from the practice of abuse of power.*

Keywords: *Checks And Balances, Executive Agency, Implementation.*

PENDAHULUAN

Prinsip Check and Balances merupakan elemen esensial dalam sistem pemerintahan demokratis, yang dirancang untuk menjaga agar kekuasaan tidak terpusat pada satu pihak dan memastikan adanya pengawasan dan keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan. Prinsip ini lahir dari pemikiran Montesquieu dalam teori Separation of Powers (pemisahan kekuasaan), yang menegaskan pentingnya pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang kekuasaan memiliki fungsinya masing-masing, namun dalam rangka menghindari potensi penyalahgunaan wewenang, setiap cabang juga diberikan mekanisme untuk mengawasi dan mengoreksi satu sama lain.

Lembaga eksekutif, sebagai pelaksana utama kebijakan negara, memiliki otoritas yang signifikan dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, hukum, hingga politik. Dengan kekuasaan yang luas ini, terdapat potensi besar bagi penyalahgunaan kewenangan apabila tidak ada sistem yang memadai untuk mengawasi tindakan lembaga tersebut. Karena itu, keberadaan system Check and Balances sangat penting dalam memastikan bahwa eksekutif menjalankan kewenangannya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang.

Di Indonesia, prinsip ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Lembaga eksekutif dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, namun kekuasaannya tidak dapat dijalankan tanpa adanya pengawasan dari lembaga legislatif dan yudikatif. DPR memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan eksekutif melalui hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat. Di sisi lain, lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh eksekutif tidak melanggar konstitusi.

Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem Check and Balances di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah dominasi lembaga eksekutif dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam situasi di mana presiden memiliki dukungan mayoritas di parlemen. Hal ini dapat mengakibatkan lemahnya fungsi pengawasan oleh legislatif, karena kepentingan politik sering kali mendominasi proses pengambilan keputusan. Selain itu, terdapat pula kasus-kasus di mana lembaga yudikatif tidak mampu menjalankan fungsinya secara efektif, baik karena tekanan politik maupun keterbatasan sumber daya.

Kasus-kasus yang mencerminkan ketidakefektifan penerapan sistem Check and Balances di Indonesia sering kali menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan adanya kekuasaan yang berjalan tanpa pengawasan yang memadai. Sebagai contoh, ketegangan antara eksekutif dan legislatif dalam beberapa kasus menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan prinsip ini. Di sisi lain, keberhasilan dalam beberapa aspek pengawasan oleh DPR dan Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan bahwa sistem ini memiliki potensi yang kuat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, apabila dijalankan secara konsisten.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana sistem Check and Balances diterapkan terhadap lembaga eksekutif di Indonesia. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem tersebut, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam praktik, serta mengeksplorasi solusi yang dapat meningkatkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas lembaga eksekutif. Dengan analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai peran sistem Check and Balances dalam menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan sistem di masa depan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis suatu fenomena secara alamiah untuk mengetahui dan memahami masalah yang dirumuskan. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu studi pustaka, yang artinya kami mengumpulkan data dengan cara menggali informasi terkait pembahasan mengenai Penerapan Sistem Check And Balances Terhadap Lembaga Eksekutif di Indonesia dari berbagai sumber seperti dokumen dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen berbentuk foto atau gambar. Kami juga mencari informasi dari dokumen elektronik melalui berbagai media elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Diterapkannya Sistem Check And Balances Terhadap Lembaga Eksekutif

Penerapan sistem check and balances terhadap lembaga eksekutif sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan demokratis. Lembaga eksekutif yang memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan dan melaksanakan undang-undang berpotensi besar untuk menyalahgunakan kekuasaannya, terutama ketika tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif. Tanpa adanya pengawasan dari lembaga lain seperti legislatif dan yudikatif, lembaga eksekutif bisa mengambil keputusan yang bersifat otoriter atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sistem check and balances memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh eksekutif tetap berada dalam batas yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada legislatif maupun kepada rakyat yang diwakili oleh legislatif.

Salah satu urgensi utama penerapan sistem ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga eksekutif. Kekuasaan eksekutif yang besar, jika tidak diawasi, bisa menyebabkan otoritarianisme atau kebijakan yang merugikan masyarakat. Misalnya, dalam hal pengelolaan anggaran negara atau penerapan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan publik, eksekutif membutuhkan pengawasan agar keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Pengawasan dari legislatif, yang bertanggung jawab untuk mewakili rakyat, serta dari lembaga yudikatif yang memastikan kebijakan eksekutif sesuai dengan konstitusi, sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan transparan.

Selain itu, penerapan sistem check and balances juga mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, eksekutif tidak boleh bertindak secara sepihak tanpa memberikan penjelasan yang jelas kepada publik mengenai kebijakan yang diambil. Dengan adanya mekanisme pengawasan dari legislatif dan yudikatif, lembaga eksekutif terpaksa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada kedua lembaga tersebut, serta kepada rakyat yang diwakili oleh legislatif. Akuntabilitas ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan masyarakat atau melanggar hak-hak konstitusional.

Lebih jauh lagi, sistem check and balances juga berperan dalam meningkatkan profesionalisme dan efisiensi lembaga eksekutif. Pengawasan dari lembaga lain dapat mendorong lembaga eksekutif untuk lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan. Keputusan yang diambil oleh eksekutif harus berdasarkan pertimbangan yang matang, mengingat kebijakan tersebut akan diawasi dan dievaluasi oleh lembaga pengawas. Hal ini menciptakan iklim yang lebih profesional dalam pengambilan keputusan, karena setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh gegabah. Dengan demikian, kualitas kebijakan yang dihasilkan dapat meningkat, dan eksekutif akan lebih fokus pada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu.

Sistem check and balances juga berfungsi untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan yudikatif akan mengurangi peluang bagi pejabat eksekutif untuk terlibat dalam praktik-praktik KKN, karena tindakan mereka selalu berada di bawah pengawasan yang ketat. Dalam pemerintahan yang tidak memiliki sistem pengawasan yang baik, potensi terjadinya KKN menjadi lebih besar karena tidak ada pihak yang bisa mengontrol tindakan yang diambil oleh eksekutif. Oleh karena itu, penerapan sistem check and balances menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN.

Dalam konteks Indonesia, penerapan sistem check and balances terhadap lembaga eksekutif dapat dilihat dalam berbagai contoh kebijakan yang menuai kritik. Misalnya, kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya alam sering kali memunculkan ketidakpuasan dari masyarakat dan lembaga legislatif. Sistem pengawasan yang efektif dari legislatif dan yudikatif dapat membantu mencegah kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat atau merusak lingkungan. Jika sistem ini diterapkan dengan baik, kebijakan yang diambil oleh eksekutif akan lebih terarah dan lebih mencerminkan kepentingan publik, serta tidak semata-mata didorong oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu.

Secara keseluruhan, penerapan sistem check and balances terhadap lembaga eksekutif sangat mendesak untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan adanya pengawasan dari lembaga legislatif dan yudikatif, eksekutif tidak akan bisa bertindak sewenang-wenang dan harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil. Hal ini tidak hanya menjaga keseimbangan kekuasaan, tetapi juga memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif digunakan untuk kepentingan rakyat dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang telah diatur dalam konstitusi

Efektifitas Pelaksanaan Sistem Check And Balances Terhadap Lembaga Eksekutif Di Indonesia

Sistem check and balances adalah mekanisme pengawasan dan keseimbangan antara lembaga-lembaga negara yang bertujuan untuk mencegah perlindungan kekuasaan. Hal ini untuk memastikan setiap lembaga tidak melebihi kewenangannya dan tetap terjaga di dalam batas kewenangan yang diatur oleh konstitusi. Dalam hal lembaga eksekutif, efektivitas pelaksanaan sistem ini berkaitan dengan sejauh mana lembaga-lembaga lain, seperti legislatif dan yudikatif, dapat mengawasi, menyeimbangkan, dan membatasi kekuasaan eksekutif sesuai ketentuan konstitusi.

Keberhasilan pelaksanaan sistem check and balances terhadap lembaga eksekutif sangatlah penting untuk menjaga kestabilan sistem pemerintahan dan mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan. Namun efektivitas sistem check and balances dalam praktiknya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas regulasi, independensi lembaga-lembaga negara, budaya politik, serta kemampuan dan integritas pejabat publik. Tantangan utama yang dihadapi adalah membangun keseimbangan yang tepat antara memberikan kekuasaan yang cukup untuk eksekutif menjalankan pemerintahan secara efisien, sekaligus memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif.

Meskipun sistem check and balances secara konstitusional sudah diterapkan sejak amandemen UUD 1945, efektivitas pelaksanaannya terhadap eksekutif masih belum optimal. Masih ada sejumlah kendala dan tantangan yang membuat sistem ini kurang berjalan maksimal. Salah satu tanda lemahnya pelaksanaan sistem check and balances adalah kuatnya dominasi kekuasaan eksekutif, selain kekuasaan di bidang eksekutif, presiden juga mempunyai kekuasaan di bidang legislatif dan yudikatif, yang terlihat dari beberapa kasus di mana kebijakan atau undang-undang yang diinisiasi pemerintah disetujui dengan cepat oleh DPR tanpa pengawasan yang ketat. Salah satu contohnya adalah UU

Cipta Kerja, yang proses pembentukannya dinilai terlalu tergesa-gesa dan minim partisipasi publik.

Lemahnya peran DPR dalam mengawasi eksekutif menjadi salah satu penghambat efektivitas sistem check and balances. DPR yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif, terkadang hanya menyetujui kebijakan pemerintah begitu saja, terutama ketika partai-partai pendukung pemerintah menguasai mayoritas kursi di parlemen. Polarisasi politik yang tinggi juga menghambat efektivitas sistem check and balances karena konflik antar partai politik sering membuat kerja sama yang seharusnya konstruktif antara eksekutif dan legislatif menjadi sulit, sehingga mekanisme saling mengawasi tidak berjalan sebagaimana mestinya .

Selain itu, kurangnya transparansi dan akses publik terhadap informasi juga menghalangi sistem check and balances yang efektif. Tanpa informasi yang memadai, publik dan lembaga pengawas akan sulit memantau atau mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, terdapat beberapa kemajuan positif, seperti peran Mahkamah Konstitusi yang aktif melakukan judicial review terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, menunjukkan adanya mekanisme sistem check and balances antara yudikatif terhadap produk legislasi eksekutif dan legislatif. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penguatan kapasitas serta independensi DPR dan lembaga yudikatif, dan peningkatan partisipasi publik dan transparansi dalam proses kebijakan untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah .

Bentuk Penyimpangan Dalam Implementasi Sistem Check And Balances Terhadap Lembaga Eksekutif

Di dalam implementasi sistem check and balances terhadap lembaga eksekutif masih ditemukan penyimpangan yang terjadi karena beberapa faktor, diantaranya:

1) Kekuasaan yang tidak seimbang

Negara Indonesia yang menganut separation of powers membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian, yaitu eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Dalam hal ini, lembaga eksekutif yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tentu memegang dominasi yang besar tanpa bisa di hindarkan.

2) Kurangnya Independensi Lembaga

Lembaga negara seringkali terpengaruh oleh kepentingan dan intervensi dari lembaga negara lain, hal ini menyebabkan independensi dari sebuah lembaga negara hilang. Sehingga lembaga negara tersebut tidak dapat melakukan tugasnya dengan objektivitas yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan.

3) Pengaruh politik yang besar

Adanya pengaruh politik bisa mempengaruhi kerja sama antar lembaga negara. Sehingga sering terjadi perbuatan pemerintah yang dilakukan demi kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi sebuah lembaga negara.

Bentuk penyimpangan yang terjadi pada penerapan sistem check and balances di antaranya yaitu:

1. Adanya perasaan terganggu dari lembaga eksekutif terhadap pengawasan yang dilakukan oleh lembaga lain dalam penerapan sistem check and balances.

Penerapan sistem check and balances dilakukan dengan melakukan pengawasan silang antar lembaga sesuai dengan trias politica, yaitu adanya pengawasan silang antara lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Dalam proses pengawasan sering kali lembaga eksekutif merasa terganggu dan merasa paling benar terhadap pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan lembaga yudikatif terhadap lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif yang didalamnya terdiri dari Presiden

dan Wakil Presiden yang notabenehnya adalah sebagai orang nomor satu di Indonesia sekaligus pemimpin dan pemegang kekuasaan pemerintahan seringkali merasa paling berkuasa, padahal pada kenyataannya ketiga lembaga tersebut memiliki hubungan horizontal, yang artinya ketiga lembaga tersebut memiliki hubungan yang setara dan saling melengkapi serta saling berkaitan.

2. Dominasi Lembaga Eksekutif dalam Proses Legislasi

Lembaga eksekutif juga diberi fungsi legislatif yaitu wewenang untuk ikut serta dalam proses perumusan dan pengesahan undang-undang bersama dengan lembaga legislatif. Lembaga eksekutif yang memegang kekuasaan paling besar atas pemerintahan seringkali mendominasi Lembaga Legislatif dalam pembuatan kebijakan dan undang-undang. Sehingga bisa di bilang wewenang lembaga legislatif di ambil alih oleh lembaga eksekutif. Dalam hal ini, karena dukungan politik yang besar, lembaga eksekutif dapat membuat undang-undang atau kebijakan yang bisa digunakan untuk mendukung kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi lembaga eksekutif. Hal ini tentu bukan merupakan suatu hal yang baik, dengan adanya conflict of interest tersebut rakyat bisa saja di rugikan.

3. Dominasi Lembaga Eksekutif terhadap Lembaga Yudikatif

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga yudikatif merupakan lembaga yang independen dan berfungsi sebagai pengawal kebijakan negara. Namun independensi Lembaga yudikatif di Indonesia seringkali hilang sebagai akibat dari besarnya dominasi lembaga eksekutif terhadap lembaga negara lain. Hakim yang berada di bawah kementerian kehakiman harus tunduk kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan. Sehingga lembaga yudikatif yang seharusnya bersifat independen tanpa intervensi dari lembaga negara lain harus kehilangan independensinya.

Solusi Yang Harus Dilakukan Untuk Mengatasi Penyimpangan Yang Terjadi Dalam Implementasi Sistem Check And Balances Terhadap Lembaga Eksekutif

Solusi yang dapat dilakukan mengatasi penyimpangan dalam implementasi sistem checks and balances terhadap lembaga eksekutif antara lain:

- 1) Memperkuat independensi lembaga-lembaga negara, terutama lembaga yudikatif, agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif tanpa intervensi politik. Ini bisa dilakukan misalnya dengan cara memperketat proses seleksi dan pengangkatan pejabat-pejabat di lembaga yudikatif, memberikan jaminan masa jabatan yang pasti, memperkuat aturan tentang konflik kepentingan.
- 2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga eksekutif, misalnya melalui cara penguatan fungsi pengawasan DPR, peningkatan akses publik terhadap informasi kebijakan dan anggaran pemerintah, penguatan lembaga-lembaga pengawas independen seperti KPK.
- 3) Menyeimbangkan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dalam proses legislasi, misalnya dengan cara pembatasan hak veto presiden, penguatan kapasitas DPR dalam penyusunan undang-undang, mekanisme konsultasi publik yang lebih luas dalam proses legislasi.
- 4) Meningkatkan transparansi dan akses informasi bagi publik, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan.
- 5) Membenahi sistem rekrutmen pejabat publik agar lebih transparan dan berbasis kompetensi.
- 6) Memperkuat budaya dan etika checks and balances di kalangan pejabat negara, sehingga pengawasan tidak dianggap sebagai ancaman.
- 7) Meningkatkan kapasitas dan independensi lembaga yudikatif dalam melakukan judicial review.

- 8) Mendorong peran aktif masyarakat sipil dan media dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
- 9) Melakukan evaluasi dan perbaikan regulasi terkait mekanisme checks and balances antar lembaga negara.

Solusi-solusi tersebut perlu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan untuk mewujudkan sistem checks and balances yang efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

KESIMPULAN

Penerapan sistem check and balances terhadap lembaga eksekutif memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan. Sistem ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, di mana eksekutif tidak dapat bertindak tanpa pengawasan dari lembaga legislatif dan yudikatif. Dengan demikian, kekuasaan eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, yang pada gilirannya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, pengawasan terhadap eksekutif juga mendorong terciptanya kebijakan yang lebih efisien dan profesional, serta membantu mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merugikan masyarakat.

Namun, meskipun sistem check and balances secara konstitusional telah diterapkan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah dominasi kekuasaan eksekutif yang terkadang mengurangi efektivitas pengawasan dari legislatif dan yudikatif. Polarisasi politik yang kuat dan kurangnya independensi lembaga-lembaga negara juga menjadi hambatan besar dalam menjalankan sistem ini dengan baik. Dalam beberapa kasus, lembaga legislatif cenderung lebih mendukung kebijakan eksekutif, yang mengurangi fungsinya sebagai pengawas yang independen.

Penting untuk diingat bahwa meskipun ada tantangan, penerapan sistem ini tetap sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, adil, dan transparan. Penguatan kapasitas lembaga negara, terutama dalam hal pengawasan, serta perbaikan regulasi yang mengatur hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sangat dibutuhkan untuk memastikan sistem check and balances dapat berjalan dengan efektif dan membawa manfaat yang optimal bagi masyarakat.

SARAN

Beberapa langkah yang bisa diambil untuk memperbaiki dan memperkuat penerapan sistem check and balances antara lain:

- 1) Memperkuat independensi lembaga-lembaga negara, terutama lembaga yudikatif, agar dapat mengawasi kebijakan eksekutif dengan objektivitas yang tinggi tanpa intervensi dari kekuasaan politik.
- 2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga eksekutif, melalui pengawasan yang lebih ketat oleh DPR serta pemberian akses publik yang lebih luas terhadap informasi kebijakan dan anggaran.
- 3) Menyeimbangkan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, dengan mengurangi dominasi eksekutif dalam proses legislasi dan memberikan ruang bagi peran legislatif yang lebih konstruktif.
- 4) Menguatkan kapasitas DPR dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan terhadap eksekutif, agar kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan berpihak pada kepentingan publik.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam setiap kebijakan publik untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat dikontrol oleh masyarakat luas.

Penerapan solusi-solusi ini secara konsisten akan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel, demokratis, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahirullah, Rajab, dan Muhtar Said, “Urgensi Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia,” *Advances in Social Humanities Research*, 1.9 (2023), hal. 1018 <<https://adshr.org/index.php/vo/article/view/119>>
- Ahsanul Khuluqi, M (Arfana)hammad, dan Muwahid Muwahid, “Sejarah Sistem Pemerintahan dan Kekuasaan Eksekutif di Indonesia,” *Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26.2 (2024), hal. 167–80, doi:10.15642/alqanun.2023.26.2.167-180
- Lailam, Tanto, “Problem dan Solusi Penataan Checks and Balances System dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia (Problem and Solutions for Arranging of The Checks and Balances System in The Process of Making Law and Constitutional Review in Indonesia),” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 12.1 (2021), hal. 123–42 <<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1721>>
- MPR RI, “Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Badan Pengkajian MPR RI*, 1 (2017), hal. viii–251
- Pitoy, H, F, “Mekanisme Checks And Balances Antara Presiden Dan DPR Dalam Pemerintahan Presidensial Di Indonesia,” *Jurnal Elektronik Bagian Hukum, Volume 2.Nomor 5* (2014)
- Pulungan, Rizky Andrian Ramadhan, dan Lita Tyesta A.L.W, “Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.2 (2022), hal. 280–93, doi:10.14710/jphi.v4i2.280-293
- Rahmatullah, Indra, “Rejuvinasi Sistem Checks and Balances,” *Jurnal Cita Hukum*, 1 (2013)
- Romaliani, Karina, Fakultas Syariah, dan Dan Ilmu Hukum, “Check and Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Skripsi Program Hukum Tata Negara,” 2020
- Studi, Program, Hukum Fakultas, Hukum Universitas, Bina Bangsa, Sekolah Tinggi, dan Ilmu Hukum, “PRAKTIK CHECK AND BALANCE DALAM KETATANEGARAAN DI INDONESIA ANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR,” 4 (2024), hal. 529–36
- Arfana, N. T. (n.d.). Akil Mochtar Paparkan Pentingnya Mekanisme Check and Balances untuk Pemerintahan Demokratis. Mahakamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Patul, D., Kornelis, Y., & Zukriadi, D. (2024). Penguatan Mekanisme Check and Balances untuk Mencegah Korupsi dalam BUMN: Perspektif Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Hukum Kewarganegaraan*.